

Kemana Karakter Bangsa Kita Kini?

Suhadi Purwantoro*

ABSTRAK

Permasalahan nasional yang akhir-akhir ini muncul seperti masalah etika anggota DPR, semakin banyaknya penjahat berkrah putih, masuknya Indonesia sebagai negara terkorup di Asia Pasifik dan dunia, menjadi keprihatinan banyak warga bangsa. Demikian juga yang berkaitan langsung dengan etika kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan berkurangnya etika warga masyarakat juga menjadi perhatian dalam artikel ini. Hal itu tidak terlepas dari kurikulum di sekolah yang mengajarkan budi pekerti.

Artikel ini mengulas tentang keberadaan dan pentingnya pendidikan karakter yang berkaitan erat dengan pelajaran budi pekerti. Di dalam artikel ini dikemukakan tentang perjalanan kurikulum tentang pelajaran budi pekerti sejak masa kemerdekaan hingga pasca reformasi. Berkaitan dengan pendidikan kemandirian juga diulas dalam tulisan ini. Tulisan ini juga berharap agar ada perhatian dari para elit pendidikan di Kementerian Pendidikan Nasional agar mengedepankan pendidikan karakter sesuai dengan permintaan presiden dan juga masyarakat Indonesia kepada Menteri Pendidikan yang baru.

Pendahuluan

Pasal 3 UU Sisdiknas berbunyi "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pada uraian pasal 3 tersebut jelas sekali dari 8 (delapan) potensi peserta didik, yang ingin dikembangkan untuk membangun karakter atau kepribadian ada 5 (lima) potensi, yaitu agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Berarti dari UU Sisdiknas jelas menekankan agar pendidikan lebih menekankan pada pembentukan karakter.

Istilah karakter banyak digunakan sebagai kajian ilmu psikologi pada abad ke 19, tetapi pada abad ke 20 istilah karakter berubah menjadi kepribadian atau *personality* (Imam Chourmain, 2010). Sifat-sifat kepribadian antara lain: disiplin (*discipline*), kejujuran (*honest*), kemampuan (*competent*), cerdas (*intelligent*), berterus terang

(*straight forward*), dapat dipercaya (*dependable*), pemberani (*caourageous*), peduliaan (*caring*), bekerjasama (*cooperative*), setia (*loyal*), dan mawas diri (*self- controled*).

Gagalnya ujian nasional di beberapa sekolah pada Ujian Akhir Nasional beberapa waktu yang lalu karena dicurigai para guru memberikan jawaban soal kepada murid, menjadi salah satu tolok ukur ketidakjujuran yang dilakukan oleh para insan pendidikan di negeri ini. Analog dengan itu adalah tingginya angka korupsi yang terjadi di negeri ini di dunia, juga menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa sudah tidak lagi menjadikan kejujuran sebagai kepribadian bangsa. Dalam hal yang lain, tingginya angka kecelakaan lalulintas baik di darat, di laut, maupun di udara, menunjukkan rendahnya tingkat kedisiplinan masyarakat. Hilangnya sejumlah puluhan baut di Jembatan Suramadu, sering rusaknya sarana umum seperti telpon umum, lampu penerangan jalan, dan sebagainya adalah contoh kurangnya rasa kepemilikan (*rasa handarbeni*). Sikap cemooh para anggota dewan perwakilan rakyat dengan serempak bilang "huuuuu...." terhadap Presiden RI di Senayan pada awal masa reformasi bergulir menjadi sesuatu yang memprihatinkan. Demikian pula kerasnya pertanyaan terhadap Wakil Rresiden Republik Indonesia dari beberapa anggota Pansus Century DPR semakin membelalakkan mata bangsa ini untuk segera difikirkan jalan keluarnya sehingga bangsa Indonesia kelak menjadi bangsa yang memiliki karakter yang baik.

Tolok ukur kualitas kehidupan suatu masyarakat adalah karakter yang baik. Karakter yang baik diperoleh dari pendidikannya, yaitu pendidikan karakter. Untuk itu perlu adanya pendidikan kepribadian. Pendidikan kepribadian merupakan salah satu pendidikan karakter agar peserta didik memiliki watak yang baik. Pendidikan karakter yang berhasil diharapkan akan membentuk anak yang jujur, sopan, disiplin, tanggungjawab, rajin, mencintai dan bangga terhadap tanah air, dan sebagainya. Lickona mengemukakan, pendidikan karakter atau *character education is the deliberate, proactive effort to develop good character in kids—or, more simply, to teach children right from wrong. It assumes that right and wrong do exist, that there are objective moral standards that transcend individual choice—standards like respect, responsibility, honesty, and fairness—and that we should teach these directly to young people*. Menurut pendapat Lickona tersebut aspek-aspek penting dalam pembentukan

karakter, seperti hormat (*respect*) pertanggungjawaban (*responsibility*), kejujuran (*honesty*), dan keadilan (*fairness*).

Bangsa ini merindukan anak-anak harus permisi lebih dahulu ketika akan menempati tempat duduk di tempat umum, di bus kota, dengan kalimat yang enak didengar. Kalimat-kalimat seperti: "Bolehkan saya duduk disebelah Anda?", atau "Maaf, bolehkah saya merokok di dekat Anda?", atau di tempat umum mengucapkan permisi "*Nuwun sewu kulo nunut leren nggih, mas!*", atau anak yang diminta ibunya memberitahu ayahnya, maka anak berkata sopan "*Bapak, diaturi dahar ibu!*". Itu sangat berlainan dengan sebagian anak sekarang, sikap anak yang mungkin terlalu akrab terhadap ayahnya sehingga ketika anak disuruh ibunya memberitahu ayahnya untuk segera makan, anak berteriak "Pak, disuruh makan ibu!". Kadang masih juga terdengar pembicaraan di tempat umum, katakanlah di pertokoan, ketika seseorang ibu dengan sopan kepada penjual yang jauh lebih muda: "*Nuwun sewu badhe tumbas lisah mambet mbak!*" malah jawabnya terkesan tidak tahu etika: "*Lagi ora dodol minyak!*". Faktor bahasa barangkali membuat etika seseorang kurang pas, karena dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaan tingkat kesopanan berbahasa, seperti bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain. Untuk itulah semoga pembelajarn bahasa daerah akhir-akhir ini akan menuai hasil positif terhadap budi pekerti, minimal dalam berbahasa.

Bangsa ini juga merindukan banyak insan berpendidikan bersikap santun dengan berjabat tangan erat sambil tersenyum, memberi ruang kepada orang lain untuk lewat atau kalau di jalan memberi kesempatan kendaraan lain untuk menyeberang, tidak meludah di tempat umum, tidak suka menguping pembicaraan orang lain, tidak suka memotong pembicaraan orang lain yang belum sampai selesai, dan banyak hal lain. Bahkan yang lebih parah lagi, sekarang ini terkadang sulit membedakan mana guru mana murid, bukan karena usianya, tetapi karena tatakramanya. Padahal keutamaan guru, menurut kitab Hidayat Jati antara lain adalah *Alus ing wicara, ora sok memisuh lan supata*, yaitu sopan cara bicaranya, tidak suka mengumpat, dan *Jatmika ing solah*, yaitu berperilaku baik. Hal itu terjadi barangkali karena pemberian sertifikat guru demikian mudah. Semoga beberapa hal itu hanya kasus saja.

Guru diharapkan membekali peserta didik tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi tentu juga pada aspek psikomotorik, dan afektif. Untuk itulah perlunya pendidikan kecakapan hidup akademik (*academic lifeskills education*), pendidikan kecakapan hidup keterampilan (*vocational lifeskills education*), pendidikan kecakapan hidup yang bersifat general (*generic lifeskills education*). Pendidikan kecakapan hidup yang paling mendasar (*generic lifeskills education*) banyak diberikan di pendidikan dasar. Di jenjang ini anak dibekali banyak sikap hidup yang paling mendasar antara lain berkaitan dengan etika dan tatakrama.

Pendidikan kecakapan hidup agar anak fasih mengucapkan “*Good morning, Sir!*”, atau “*Thank you, Sir!*”, “*Thank you, mom!*” di negeri Inggris sangat ditekankan. Hal itu sangat baik ditiru bangsa ini agar anak fasih berucap “Asalammualaikum, Pak!”, “Selamat pagi, Pak!”, “Terima kasih, Bu!” “Maaf, Mbak!”, “Permisi, Bu!”, “*Tak trimo, ya le!*”. Makna kata “Pak”, “Bu”, “Mbak” atau “Mas”, sangat besar artinya untuk menunjukkan perhatian dan penghormatan terhadap lawan bicara.

Salah satu mata pelajaran paling penting untuk membentuk karakter seseorang di negeri manapun adalah pendidikan kepribadian. Dalam suatu kurikulum yang sama sekalipun belum tentu akan menghasilkan kualitas yang sama. Contohnya meskipun dalam kisah Mahabharata, Guru besar Drona memberi proses pembelajaran yang sama di Perguruan Sokalima, dengan kurikulum yang sama, nyatanya menghasilkan sebagian kecil lulusan berkualitas tinggi (Pandawa), dan sebagian besar kualitas kurang baik (Korawa). Semua berpulang juga kepada peserta didik, yang barangkali karena juga pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan bermain. Kasus anak usia empat tahun di Jawa Timur yang sudah kecanduan merokok serta suka mengeluarkan kata-kata kotor adalah contoh begitu buruknya pengaruh lingkungan bermain dan keluarga terhadap perkembangan pendidikan anak. Dengan demikian pendidikan karakter khususnya yang terkait dengan budi pekerti tidak boleh hanya semata-mata digantungkan kepada sekolah. Peran orangtua sangat besar dalam mendidik anak.

Beberapa contoh di atas tentang perilaku bangsa ini memprihatinkan kita semua. Kalau peristiwa itu hanya terjadi sesekali tentu itu hanya dapat dikategorikan kelalaian, tetapi kalau sudah berulang-ulang hal itu sudah hampir menjadi seperti budaya. Dimanakah letak kesalahannya? Apakah karena bangsa ini terlalu permisif terhadap

budaya asing? Apakah karena pengaruh media masa seperti TV? Apakah karena lembaga sensor hampir tidak berfungsi? Apakah pada kurikulum sekolah? Untuk yang terakhir ini, marilah kita tengok ke belakang kurikulum pendidikan nasional di tingkat pendidikan dasar. Mengapa di tingkat pendidikan dasar? Karena pembekalan pendidikan karakter terhadap anak, paling besar porsi pada anak-anak di sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.

Perkembangan kurikulum

Kurikulum tahun 1947 hingga kurikulum 2004 pendidikan kecakapan hidup yang bersifat mendasar diberikan dalam berbagai versi. Mengacu tulisan Prof. Dedi Supriadi dari UPI, segera setelah pemerintah Republik Indonesia berdiri, pada tahun 1947 Kurikulum Pendidikan waktu itu memunculkan mata pelajaran Pendidikan Budi Pekerti sebagai salah satu dari 16 mata pelajaran di Sekolah Dasar (SD). Mata pelajaran itu berdiri sendiri dan terpisah dari Pendidikan Agama. Jumlah jam pelajarannya untuk kelas I dan II hanya satu jam, selanjutnya untuk kelas III, IV, dan V meningkat menjadi dua jam, dan pada kelas VI menjadi tiga jam per minggu. Pada waktu itu pelajaran Pendidikan Agama yang diputuskan melalui Ketetapan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama baru dimulai sejak kelas IV SD reguler masing-masing 2 jam per minggu. Bahkan di SD yang diselenggarakan sore hari, Pendidikan Agama baru diberikan di kelas V-VI masing-masing dengan 2 jam.

Dalam pemikiran para penentu kebijakan waktu itu menunjukkan bahwa, pendidikan budi pekerti mendapatkan perhatian yang lebih besar, daripada pendidikan agama. Muatan pendidikan budi pekerti saat itu lebih banyak berupa sopan santun, etika, sikap hormat dan saling menghargai, berdasarkan acuan-acuan nilai budaya, dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat, keluarga, dan sekolah. Kurikulum selalu berubah sesuai dengan perkembangan jaman, dalam arti menyesuaikan tuntutan zaman.

Pada tahun 1964, Kurikulum diubah dengan Kurikulum Sekolah Rakyat (SR). Dalam kurikulum ini, pelajaran Pendidikan Budi Pekerti disatukan dalam mata pelajaran yang disebut pelajaran Agama/Budi Pekerti. Mata pelajaran ini berada dalam

kelompok Perkembangan Moral bersama Pendidikan Kemasyarakatan yang merupakan gabungan dari Sejarah, Ilmu Bumi, dan Kewarganegaraan. Sayangnya jumlah jam pelajarannya menjadi berkurang, masing-masing untuk kelas I hanya satu jam dan kelas II sampai kelas VI sebanyak 2 jam pelajaran per minggu. Dalam pola ini, pendidikan budi pekerti sudah termasuk di dalam pendidikan agama. Kurikulum 1964 konon tidak berlaku efektif seiring krisis politik seputar peristiwa G-30 S/PKI.

Pada tahun 1968 Kementrian Pendidikan mengeluarkan kurikulum berikutnya yang dikenal sebagai Kurikulum 1968. Pada kurikulum ini nama Sekolah rakyat kembali lagi menjadi Sekolah Dasar. Prinsip utama yang melandasi kurikulum waktu itu adalah bahwa dasar pendidikan nasional adalah falsafah Pancasila. Tujuan pendidikan nasional adalah membentuk manusia Pancasila sejati. Isi pendidikan terdiri atas tiga hal, yaitu mempertinggi mental budi pekerti dan memperkuat keyakinan agama, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, serta membina fisik yang kuat dan sehat. Ciri-ciri khusus dalam Kurikulum 1968 ialah munculnya kelompok Pembinaan Jiwa Pancasila sebagai komponen yang dominan yang meliputi Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Bahasa Daerah, dan Pendidikan Olahraga. Dalam Kurikulum SD 1968, pendidikan budi pekerti tidak lagi muncul sebagai sebuah nama mata pelajaran, baik berdiri sendiri maupun disatukan dengan pendidikan agama seperti pada kurikulum sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi pergeseran orientasi pendidikan dengan mengangkat secara kuat Pendidikan Pancasila. Jumlah jam Pendidikan Agama itu sendiri cukup banyak, yaitu 2-2-3-4-4-4 di kelas I-VI SD, sama seperti Pendidikan Kewarganegaraan.

Proses berikutnya KURIKULUM 1975 datang menggantikan Kurikulum 1968. Dalam kurikulum ini, Pendidikan Agama kembali berdiri sendiri. Demikian selanjutnya kurikulum-kurikulum berikutnya, yaitu kurikulum 1984, 1994, 2004, pelajaran budi pekerti tidak pernah ada, bahkan dalam kegiatan pendidikan sekalipun barangkali sudah tidak pernah terucapkan. Di tingkat sekolah lanjutan, SMP dan SMA, pendidikan budi pekerti hanya dititipkan pada masing-masing pelajaran.

Kalau benar muatan budi pekerti sudah ada dalam agama, tetapi mengapa anak yang memperoleh nilai agama 9 atau bahkan 10 berperilaku tidak seperti yang diharapkan? Hal itu karena selama bertahun-tahun anak hanya dijejali pengetahuan

saja, kurang memberi pendidikan pada ranah afektif. Pendek kata mohon maaf kalau boleh disampaikan dengan sangat keras bahwa pelajaran agama sama gagalnya dengan pelajaran bahasa Inggris, yang hingga lulus SMA rata-rata anak Indonesia sulit berbahasa Inggris. Apakah benar karena begitu bodohnya anak-anak kita sehingga sulit menerima pelajaran? Sulit berperilaku sopan? Jawabnya tentu saja “Tidak!”. Anak-anak bangsa ini sebenarnya cukup pintar dan patuh melaksanakan perintah guru, hanya karena guru tidak mengajarkan budi pekertilah sehingga anak-anak tidak melaksanakan dan nasehat guru. Walaupun dalam pelajaran agama sudah ada muatan budi pekerti dalam bentuk pelajaran ahlak, tetapi dalam pelaksanaannya hanya dalam bentuk pengetahuan (kognitif) saja tidak mengajarkan hingga praktek (psikomotorik) bahkan sikap (afektif). Anak hanya tahu bahwa terhadap orangtua, guru, harus hormat, tetapi tidak dipraktekkan bagaimana cara menghormat kepada guru. Siswa tahu bahwa menegur orangtua harus sopan, tetapi tidak diajarkan bagaimana cara menegur sopan. Siswa tahu dan hafal bahwa memberi kesempatan kepada pengendara yang akan memotong jalan diutamakan, tetapi tidak pernah dipraktekkan? Banyak hal pelajaran ahlak tidak sekedar diberitahukan tetapi harus dipraktekkan.

Di negara yang sudah mapan, pendidikan kecakapan hidup, agar anak fasih berucap “Terima kasih” diberi *treatment* setiap hari. Ketika selesai pelajaran sekolah, guru keluar pertama sambil membuka pintu, kemudian untuk siswa pertama, katakanlah Aga, guru berucap “Terima kasih, Aga” kemudian satu per satu anak keluar bergantian memegang pintu sambil setiap anak mengucapkan kata “Terima kasih, Erna!”, “Terima kasih, Riski!”, terus hingga semua murid antre tidak berebut. Di sini anak dapat pelajaran cakap berucap “terima kasih”, dan terbiasa melakukan antre. Bahkan di negara tetangga baik Singapura, Malaysia, maupun Filipina, para siswa masih sangat hormatnya kepada para guru, dan juga tamu yang masuk di sekolah mereka. Bandingkan di sekolah-sekolah kita, para siswa, mahasiswa sudah tidak lagi, jangankan peduli, menghormat juga kurang. Itulah contoh hasil pendidikan kepribadian yang bagus dan yang buruk.

Pendidikan kepribadian merupakan salah satu pendidikan karakter agar peserta didik memiliki watak yang baik. Pendidikan karakter yang berhasil diharapkan akan membentuk anak yang memiliki kejujuran, kesopanan, kedisiplinan, tanggungjawab,

rajin, memiliki rasa empati, rasa toleransi, sportif, mencintai dan bangga terhadap tanah air (patriotis), dan sebagainya. Hal itu akan tercapai antara lain apabila para elite pendidikan, khususnya di jajaran penentu kebijakan memiliki kemauan keras mengubah karakter bangsa ini menjadi bangsa yang lebih terhormat.

Pendidikan Kemandirian

Hal lain yang sangat mendasar adalah berkaitan dengan kecakapan hidup kemandirian. Direktorat Pendidikan Nasional pernah mengadakan penelitian di sekolah-sekolah perbatasan yang ada di Kalimantan dengan Malaysia. Hasilnya, dari sisi fisik, sekolah-sekolah negeri jiran itu lebih bersih dan rapi daripada sekolah-sekolah Republik Indonesia. Mengapa demikian? Sekolah-sekolah negeri kerajaan itu mewajibkan peserta didiknya melakukan kerja bakti periodik pada jam istirahat siang. Apa yang dikerjakan para peserta didik? Pada istirahat siang, setelah melaksanakan sholat dan makan siang bagi yang muslim, mereka membagi diri ada yang menyapu, mengepel lantai, membersihkan jendela, membersihkan kamar mandi, potong rumput, dan pekerjaan-pekerjaan rumah pada umumnya. Dengan begitu peserta didik telah terbiasa melaksanakan tugas di sekolah, tidak malu dan canggung mengerjakannya, baik di sekolah maupun di rumah. Dalam hal ini sekolah menciptakan pembiasaan yang positif, yaitu terbiasa bekerja dan mencintai kebersihan serta keindahan lingkungan.

Hal bagus dan positif tersebut ternyata bertolak belakang dengan kondisi sekolah-sekolah yang ada di wilayah negeri tercinta Indonesia, walau hanya berseberangan jalan. Halaman sekolah tampak relatif kumuh, dan para peserta didik tidak ada yang melakukan kerja bakti pada jam istirahat. Mereka berada di dalam kelas tetap belajar bahkan sampai sore hari. Hal itu dapat dimaklumi karena kurikulum yang masih berlaku baik kurikulum 1999 maupun kurikulum berbasis kompetensi dan Kurikulum Tingkat satuan Pendidikan (KTSP) memunculkan dan mengedepankan materi yang muatannya relatif sangat padat. Akhirnya peserta didik hanya menjadi objek studi, kurang ada ruang peserta didik untuk mengembangkan kemampuan diri. Dalam arti, kecakapan hidup yang memberi ruang peserta didik mengembangkan kemandirian relatif rendah. Kebijakan kementerian pendidikan nasional yang menggalakkan pendidikan kewirausahaan patutlah disambut gembira oleh masyarakat,

karena pendidikan semacam itu akan membentuk jiwa peserta didik menjadi lebih mandiri. Pemerintah tentu saja tidak akan mampu memberi ruang kesempatan kerja di pemerintahan, semua sebagai pegawai negeri, karena memang hanya sedikit kebutuhan pegawai negeri. Bidang pekerjaan yang terbesar justru di dunia kewirausahaan. Dari ini peserta didik harus dibekali pengetahuan dan sikap mental bahwa menjadi wirausahawan adalah lebih baik daripada menjadi pegawai negeri. Sikap mental bangsa ini harus diubah dari mental pesuruh, mental "jongos" menjadi mental pengusaha. Setiap mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi diharapkan memiliki *mentalset* "Apa yang harus saya kerjakan agar tetap hidup?" atau "Saya akan berwirausaha apa agar meningkatkan taraf hidup saya?", bukan "Saya akan menjadi pegawai, abdi, pesuruh, *jongos* siapa?"

Harapan pada Menteri Pendidikan

Presiden SBY meminta kepada Mendiknas agar membentuk karakter bangsa ini menjadi lebih baik melalui, tentu saja, pendidikan di sekolah-sekolah hingga perguruan tinggi. Dengan demikian pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi diharapkan tidak mengenyampingkan pendidikan karakter. Untuk itu segera harus ada kebijakan rutin, yaitu sudah waktunya kurikulum harus dibongkar lagi, dirancang sebaik mungkin dengan pendidikan karakter sebagai basisnya. Kalau sepuluh tahun lalu kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah hanya mengedepankan materi, dan dilanjutkan dengan berbasis kompetensi, maka sudah saatnya mulai sekarang, kurikulum segera berubah berbasis pendidikan karakter tidak hanya menomorsatukan materi. Akankah kelak negeri ini, pendidikan hanya mengutamakan kecendekiaan tanpa mengedepankan nurani?

Kita semua sudah tahu bagaimana karakter bangsa yang akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Masyarakat sangat berharap banyak bahwa arah pendidikan nasional harus dapat mengobati luka bangsa ini karena kurang baiknya kepribadian bangsa ini. Kita tidak mau menjadi "Korawa" kita harus bertekad menjadi insan yang bersifat "Pandawa". Kita tidak mau lagi generasi yang akan datang mewarisi budaya para pengusaha yang melarikan uang ke luar negeri, para pegawai semacam Gayus Tambunan yang telah memakan banyak uang pajak, para penegak hukum yang korup,

para anggota DPR yang mengeluarkan kata-kata tidak senonoh di ruang sidang yang sangat terhormat, para pelajar dan mahasiswa yang suka tawuran, dan sifat-sifat buruk lainnya. Dalam kaitan dengan kenakalan remaja, maka beberapa sekolah yang telah dengan tegas memasukkan nilai karakter siswa, dengan tidak meluluskan siswa suatu sekolah karena siswa dianggap kelakuan atau karakternya jelek, patut diacungi jempol. Demikian juga di UNY terpaksa harus mencabut ijazah yang terlanjur diberikan ke wisudawan, setelah ketahuan ada laporan dan terbukti mahasiswa berbuat curang dalam masalah nilai ujian.

Permasalahan bangsa ini sangat kompleks. Dari sisi karakter yang berkaitan dengan kurangnya kepedulian (*care*) antar sesama umat, semakin kurangnya rasa hormat (*respect*) kepada orangtua, guru, maupun pimpinan. Demikian pula rendahnya tingkat disiplin bangsa ini dari segala sisi, baik dalam hal disiplin kerja kantoran, perusahaan, maupun disiplin lalu lintas jalan, baik jalan darat, laut serta udara. Dalam hal disiplin waktu kerja pegawai, tingkat ketepatan waktu pegawai dalam bekerja kurang baik. Dalam disiplin berlalu lintas indikatornya sangat jelas, banyaknya kecelakaan lalu lintas, baik di darat, di laut dan di udara. Bahkan rendahnya kedisiplinan penerbangan nasional berakibat dilarangnya Maskapai Penerbangan Garuda Indonesia Airways ke wilayah Eropa. Tidak kalah pentingnya adalah rendahnya masalah kejujuran (*honesty*), dari kelakuan pelajar yang suka nyontek ketika ujian, hingga masalah korupsi para birokrat (terbukti Indonesia menjadi negara terkorup di Asia Pasifik dari 16 negara), dan kecurangan pengusaha dalam membayar pajak (kasus Gayus dan Paulus Tumewu).

Penutup

Orangtua yang melihat putra putrinya nakal seharusnya tidak boleh tinggal diam. Anak yang tidak tahu sopan santun tidak boleh dibiarkan saja. Tugas orangtualah untuk menegur, dan mengarahkan putra putrinya agar menjadi anak yang saleh, anak yang hormat pada orangtua, hormat pada guru, menghormati sesama, peduli terhadap diri sendiri, orang lain, dan bahkan terhadap lingkungan, baik alam maupun sosial. Orangtua juga harus terus-menerus memberi arahan agar putra putrinya kelak menjadi

orang beretika, bertanggungjawab, yang menghargai kedisiplinan, kejujuran, hingga menjadi warga negara yang patriotik.

Pemerintah sebagai orangtua bangsa harus bersikap adil, tegas, dan jujur agar anak bangsa menjadi bangsa yang disegani dan dihormati, tidak menjadi cemoohan bangsa lain.

Pustaka

- David H. Elkind and Freddy Sweet Ph.D. *How to Do Character Education*. Goodcharacter.com
- Depdiknas, 2006. Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta.
- Depdiknas, 2004. Buku Panduan Budi Pekerti. Direktorat PGSM. Jakarta
- Imam Chourmain, 2010, Pendidikan Karakter dalam IPS. HISPISI. Yogyakarta.
- Lickona, Thomas, *Educating For Character* (New York: Bantam, 1991) Mas Kunitir, 2009. Wirid Hidayat Jati. <http://alangalangkunitir.wordpress.com/2009/02/07/bab-guru-lan-murid/>

“Effective character education is not adding a program or set of programs to a school. Rather it is a transformation of the culture and life of the school.”²

—*Dr. Marvin Berkowitz*

Kemana Karakter Bangsaku Kini?

Oleh
Suhadi Purwantoro

Disampaikan sebagai makalah pendamping dalam Seminar Nasional dalam Rangka
DIES Natalies UNY ke 46 di Ruang Ki Hajar Deawantara dengan tema Membangun
Pendidikan dalam Perspektif Karakter dan Kebangsaan 12 Mei 2010